



ARAH KEBIJAKAN RB NASIONAL

KEDEPUTIAN BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN

PROSES BISNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L/P



BEBERAPA CATATAN PELAKSANAAN RB

3

TIDAK MENGACU PADA AKAR PERMASALAHAN

1

RB BERSIFAT PROYEK



2



4

FUNGSI PENGAWASAN TIDAK OPTIMAL



TIDAK KOMPREHENSIF

Strategi Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

1



KOMITMEN

Komitmen pimpinan dan semua pegawai dalam pelaksanaan zona integritas serta menularkan semangat dan visi yang sama

2



IMPLEMENTASI SAMPAI UNIT KERJA

Implementasi reformasi birokrasi sampai di unit kerja terkecil dengan merubah pola pikir dan budaya kerja

3



PEMILIHAN PROGRAM YG TEPAT

Membuat Program yang *solving problem* yang efektif untuk mewujudkan 3 sasaran miniatur RB (Integritas, Pelayanan Publik Prima, dan Kapabilitas) bukan hanya di level KLP, juga sampai di unit kerja terkecil

4



MANAJEMEN RB (PLAN, DO, CHECK, ACTION - PDCA)

Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta tindak lanjut secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya dan umpan balik perbaikan secara kolaboratif

5



MANAJEMEN MEDIA

Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat

Z _{ST}	DPMO	Remarks
6	3.4	World-class
5	233	Significantly above average
4.2	3470	Above industry average
4	6210	Industry average
3	66800	Industry average
2	308500	Below industry average
1	691500	Not competitive

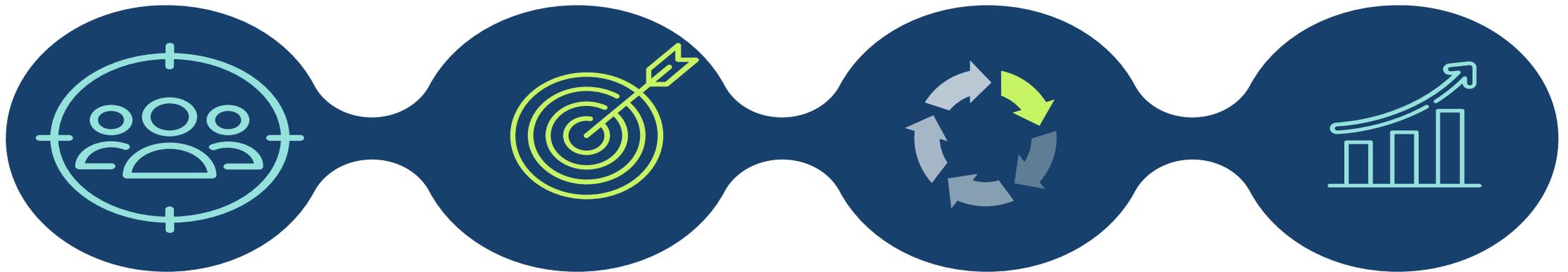
Manajemen Perubahan

MANAJEMEN PELAKSANAAN RB

Memastikan RB berjalan efektif dan meminimalisir kegagalan RB. Hal ini membutuhkan proses manajemen RB.

MINDSET DAN CULTURE SET

Meminimalisir resistensi terhadap perubahan dari zona nyaman menjadi birokrasi yang lebih bersih, berkinerja tinggi, dan kapabel



TIM RB

**ROAD MAP RB
RENCANA KERJA RB**

**PEMANTAUAN
DAN EVALUASI**

**PERUBAHAN POLA PIKIR
DAN BUDAYA KINERJA**

Manajemen Pelaksanaan RB

Melakukan perencanaan menjadi kenyataan, sesuai dengan target dan tujuan yang sudah ditetapkan, dengan proses manajemen RB

PLAN, mencari program yang mengungkit hasil reform dengan target hasil yang jelas



DO, pelaksanaan yang berorientasi reform



ACT, mendapatkan dan memanfaatkan *lesson learned* untuk penyempurnaan



CHECK, pemantauan dan evaluasi efektifitas RB berkala dan berkesinambungan

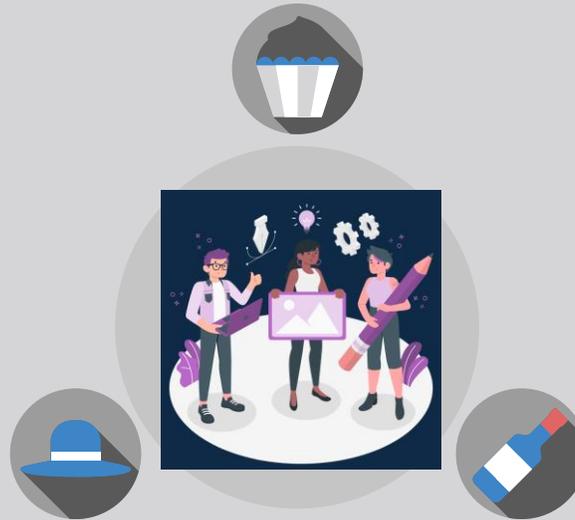
PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN

KATALIS ●

Meyakinkan dan mengajak pegawai untuk perubahan

PENGGERAK PERUBAHAN ●

Mendorong partisipasi pegawai untuk perubahan



● PEMBERI SOLUSI

Menganalisis dan memberikan alternatif solusi permasalahan unit kerja

● MEDIATOR

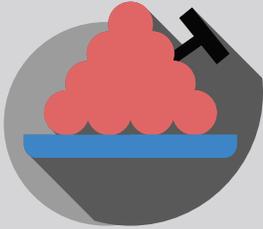
Memperlancar proses perubahan dan penyelesaian masalah dengan pihak-pihak terkait

● PENGHUBUNG

Komunikasi antar pegawai dan pengambil keputusan

Melekat dengan tugas dan fungsi individu dalam unit kerjanya tidak memerlukan pembentukan jabatan khusus yang baru

MANAJEMEN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN



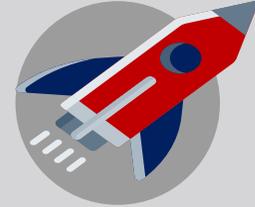
PERENCANAAN

Desain kebutuhan unit kerja dan instansi



PEREKRUTAN

Seleksi dan penetapan formal agen perubahan



PEMBINAAN

Peningkatan Kompetensi dan Integritas, *Knowledge Sharing, Benchmarking*



PENILAIAN KINERJA

Monev efektifitas proses dan hasil rencana aksi perubahan



PENGEMBANGAN

Promosi, Rotasi, Kesempatan Belajar



PENGHARGAAN

Insentif, Peningkatan Kesejahteraan, Kesempatan Karir

Target Rencana aksi agen perubahan tertuang dalam SKP pegawai.
Kinerja agen perubahan melekat dengan tugas fungsinya di dalam unit kerja.

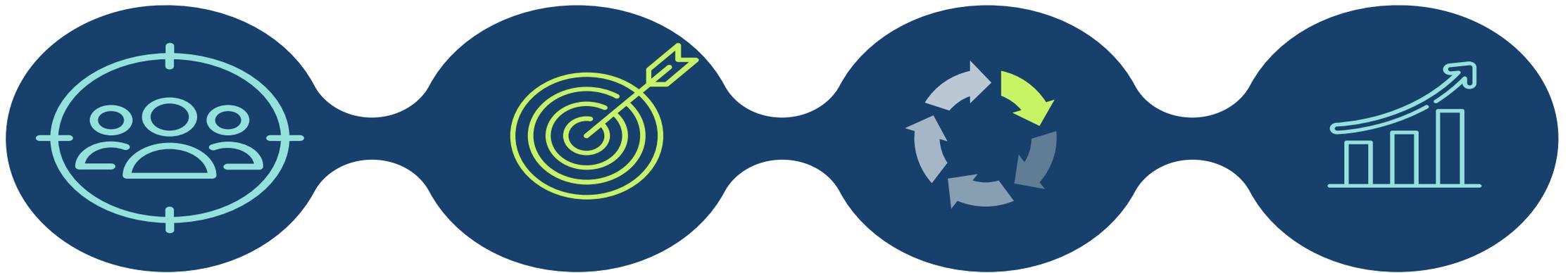
Penguatan Pengawasan

PENINGKATAN INTEGRITAS/ ANTI KKN

Menghilangkan/Meminimalisir potensi dan kejadian penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan integritas pegawai.

MANAJEMEN PENGAWASAN

Memastikan pengelolaan pengawasan yang efektif dengan manajemen dan sistem pengawasan yang berkelanjutan.



**PENGENDALIAN
GRATIFIKASI**

PENERAPAN SPIP

**PENGELOLAAN
DUMAS DAN WBS**

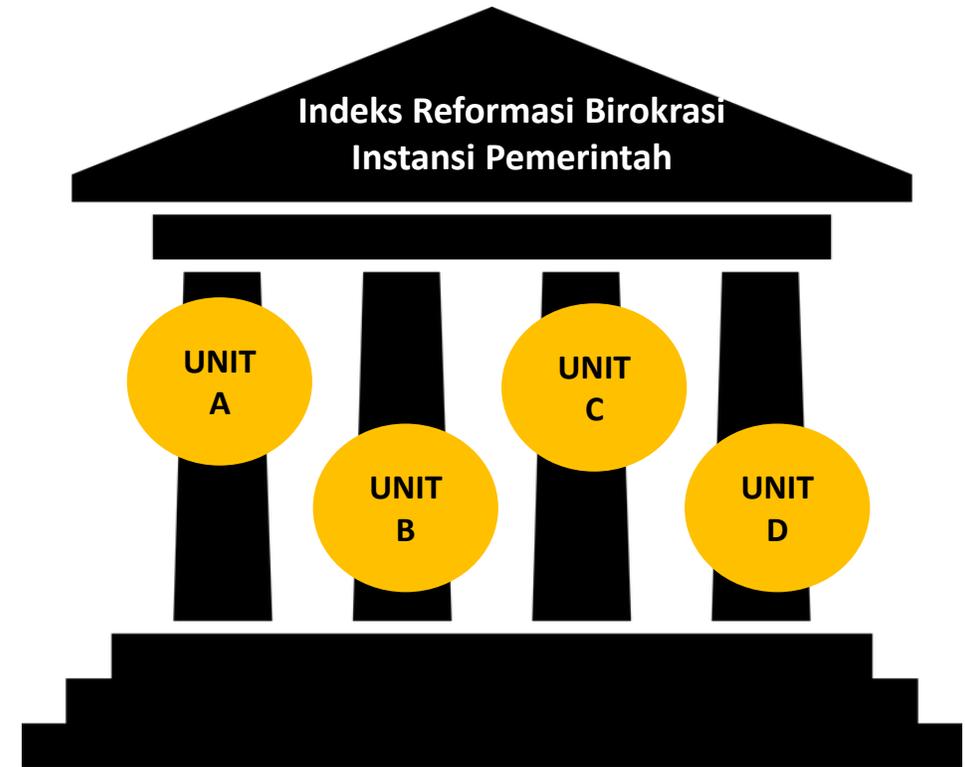
**PEMBANGUNAN ZI DAN
PERAN APIP**

Pembangunan Zona Integritas

Miniatur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia

Bertujuan untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas

Membangun percontohan (*Role Model*) pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani



UNIT PERCONTOHAN

1. Dianggap sebagai unit yang penting/ strategis dalam melakukan pelayanan publik
2. Mengelola sumber daya yang cukup besar
3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut





Fokus 3 sasaran ZI

1. INTEGRITAS

Fokus dalam pencegahan KKN melalui pengendalian dan pengawasan internal terhadap seluruh resiko penyimpangan integritas

2. PELAYANAN PUBLIK PRIMA

Fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong kepuasan penerima layanan

3. KAPABILITAS

Fokus untuk mengoptimalkan kinerja unit kerja dengan melakukan dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja



5 Kunci Pembangunan ZI



Alur Utama Penilaian dan Penetapan Zona Integritas



Syarat Pengusulan

PERMENPANRB 10/2019

Syarat	No	WBK	WBBM
Tingkat instansi pemerintah	1	Opini BPK minimal "WDP"	Opini BPK minimal "WTP"
	2	Nilai Akip minimal "B"	
Tingkat unit kerja	3	Unit kerja yang diajukan merupakan <i>core</i> layanan utama dari instansinya	
	4	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
	5	Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut	
	6		Telah mendapat predikat WBK sebelumnya
	7	LHKASN dan LHKPN 100%	

Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM

PERMENPANRB 10/2019

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal	18,50	18,50
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	13,5 (survey 3,60)	13,5 (survey 3,60)
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal	5,0	5,0
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal	16 (survey 3,2)	18 (survey 3,60)

PERBEDAAN WBK & WBBM

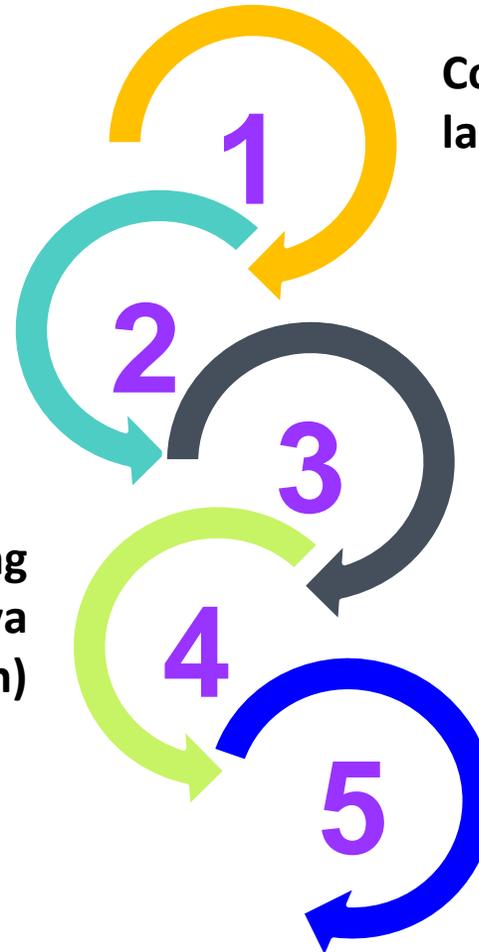
1. Tingkat kematangan implementasi perubahan
2. Tingkat keberlanjutan perubahan
3. Tingkat Kualitas Pelayanan dan kinerja

Skala Prioritas Unit Zona Integritas



Core Bussiness dan **tidak** berhubungan langsung dengan masyarakat, **tapi** dengan customer lainnya (misal: K/L/P lain)

Bukan Core Bussiness, **tidak** berhubungan langsung dengan masyarakat, **tapi** dengan customer lainnya (misal: K/L/P lain)



Core Bussiness dan berhubungan langsung dengan masyarakat

Bukan Core Bussiness dan berhubungan langsung dengan masyarakat

Supporting Internal

STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021



Penyempurnaan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional

- Penajaman Road Map RB Nasional 2020-2024
- Penyempurnaan regulasi terkait
- Diseminasi Road Map RB Nasional ke K/L/D
- Monitoring K/L/D yang telah menyesuaikan kebijakannya dengan Road Map RB terbaru



Penguatan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Daerah

- Pembentukan Tim Asistensi Daerah pada 34 Provinsi
- Training of Trainer bersama unit kerja lain
- Bimtek pada Kab./Kota prioritas (di bawah "B")
- Bimtek tematik pada Kawasan Super Prioritas Nasional
- Monitoring Kab./Kota yang telah melaksanakan rekomendasi perbaikan



Penguatan Program Evaluasi Bersama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Penyempurnaan SOP evaluasi bersama
- Pengembangan sistem informasi evaluasi (PMPRB)
- Diseminasi penggunaan sistem informasi kepada K/L/D
- Monitoring pemanfaatan sistem informasi oleh K/L/D
- Melaksanakan evaluasi K/L/D yang telah melakukan penilaian mandiri pelaksanaan RB (PMPRB)
- Menyampaikan laporan hasil evaluasi



Making Change

Making History

TERIMA KASIH



DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN

